

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, PT Grasindo.
- HAW.Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Kusnadi dan Moh Zain.*Pembaharuan Perpajakan Nasional*.P.T Citra Aditya Bakti.Bandung, 1990.
- Lukman H, 2006, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta, Andi.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Rochmad Sumitro, 1979, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Cetakan IX*, Eresco, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 2006, *Perpajakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Samudra, Azahri A, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Tjanya Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, ATM Widodo, dan Andrea Hendro Puspita. *Pajak Bumi & Bangunan Untuk Para Praktisi*, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media.

JURNAL

Abdul Hakim, “Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UII Yogyakarta*, Volume 2, I (Juli 1997)

Irwan Taufiq Ritonga, “Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia”, *Jurnal Public and Municipal Finance*, Volume 1, I (Agustus 2009)

Frisda Puspitasari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, Volume 1, III (Maret 2017)

Hastanti Agustin Rahayu, Abdul Halim, “Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta”, *Jurnal Riset Manajemen*, Volume 2, III (April 2017)

Jefri Muliadi, “Local Government Coordinating in Low Income of Payment of Earth and Urban Building (PBB-P2)”, *JOM Fisip*, Volume 1, II (Juli 2018)

Lucia Silveria Napitupulu, Novi Budiarto, “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pada Pemerintah Kota Manado”, *Jurnal EMBA*, Volume 1, II (Januari 2015)

Muniroh, Haris Budiarto, “Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kecamatan Bangkalan”, *Jurnal Komplikasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, Volume 2, II (September 2012)

Regina Usman, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal of Accounting and Finance (JAF)*, Volume 1, IV (Maret 2017)

Reni Zahriah, “Kontribusi Bagi Hasil Penerimaan PBB dan Dalam Program Bantuan Pembangunan Desa”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 1, II (November 2002)

SASANA, Hadi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, Volume 2, III (Februari 2005)

INTERNET

<http://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 21.35 WIB.

<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/#&panel1-2>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 21.46 WIB.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perubahan I, II, III, IV.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018.